

# ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2017

Sri Fajriani Ulandari<sup>1</sup>

Qarina<sup>2</sup>

Email: qarina.hairuddin@uin-alauddin.ac.id

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas UIN Alauddin Makassar

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of population, regional minimum wage (UMR), and economic growth on the inequality of income distribution in South Sulawesi Province. The data used in this study is secondary data obtained from the Central Statistics Agency of South Sulawesi Province. The analysis technique used is quantitative data analysis method with Multiple Linear Regression analysis tool with the help of SPSS 24 software.*

*The results showed that simultaneously the variables of population, regional minimum wage (UMR), and economic growth had a significant effect on the inequality of income distribution in South Sulawesi Province. And partially, the population (X1) has a positive and insignificant effect on the inequality of income distribution in South Sulawesi Province, the Regional Minimum Wage (UMR) (X2) has a negative and significant effect on the inequality of income distribution in South Sulawesi Province, and economic growth (X3) has a positive and significant effect on the inequality of income distribution in the Provinces of South Sulawesi. From the regression results, the value of R-Squared (R<sup>2</sup>) is 0.790. This means that the independent variable is able to explain the dependent variable 79% while the remaining 21% is explained by other variables outside the model.*

**Keywords:** *Total Population, Regional Minimum Wage (UMR), Economic Growth, and Inequality of Income Distribution*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, upah minimum regional (UMR), dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kuantitatif dengan alat analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan *software* SPSS 24.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variable jumlah penduduk, upah minimum regional (UMR), dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan secara parsial, jumlah penduduk (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan, Upah Minimum Regional (UMR) (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan, dan pertumbuhan ekonomi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil regresi, nilai R- Squared (R<sup>2</sup>) sebesar 0,790. Ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen 79% sedangkan sisanya 21% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

**Kata Kunci:** Jumlah Penduduk, Upah Minimum regional (UMR), Pertumbuhan ekonomi, dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

## **ARTICLE INFO**

Received 22 Juni 2021

Accepted 5 Agustus 2021

Online 6 Agustus 2021

\*Correspondence: Qarina

E-mail: qarina.hairuddin@uin-  
alauddin.ac.id

## Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup bangsa yang sering kali diukur dengan menggunakan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Selain meningkatkan pendapatan riil perkapita, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur tersedia lebih banyak, pendidikan semakin maju, teknologi meningkat, kesempatan untuk berusaha semakin berkembang implikasinya banyak kesempatan kerja, pendapatan masyarakat juga meningkat dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi.

Dua masalah besar yang umumnya di hadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan 2001 dalam Vredrich Bantika, 2015).

Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Suryono (2000) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Karena itu, perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan di lakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, walau demikian provinsi ini juga mengalami masalah peningkatan nilai Gini *ratio* yang berarti terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan adanya masalah ketimpangan distribusi pendapatan, di khawatirkan akan menimbulkan masalah yang tidak hanya terjadi di perekonomian akan tetapi juga menimbulkan masalah politik.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 2017 sebesar 7,21 persen sedikit lebih kecil di bandingkan tahun 2016 yang mencapai 7,42 persen. Namun, berhasil menempati urutan kedua tertinggi nasional setelah Maluku Utara, dengan total PDRB diciptakan mencapai Rp. 48,21 juta atau meningkat 9,29 persen jika di bandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 44,11 juta. Sementara Maluku Utara di peringkat pertama dengan persentase sebesar 7,67 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp. 26,85 Juta pada tahun 2017.

**Tabel 1: PDRB dan Rasio Gini di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Tahun	PDRB (Persen)	Ratio Gini (persen)
2013	7.65	0.432
2014	7.54	0.448
2015	7.19	0.404
2016	7.42	0.400
2017	7.21	0.429

Sumber: BPS (2017)

Berdasarkan Tabel 1, Gini Ratio di Sulawesi Selatan ini berfluktuasi dari waktu ke waktu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan seperti yang di publikasi melalui website resminya, di ketahui Gini Ratio pada tahun 2015 sebesar 0.404 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0.448 tahun 2014 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 sebesar 0.400. tapi terjadi peningkatan kembali pada tahun 2017 sebesar 0.429.

Distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan yang diukur dengan indeks gini relatif timpang padahal pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan yang diukur dengan PDRB cukup tinggi. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa di Sulawesi selatan terjadi ketimpangan pendapatan yang berakibat pada pertumbuhan penduduk miskin semakin meningkat.

PDRB perkapita daerah merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah, di mana jika semakin besar PDRB perkapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga sebaliknya apabila PDRB semakin kecil maka bisa diartikan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Banyak faktor yang mempengaruhi ketimpangan suatu wilayah. Myrdal dalam Jhingan (1990) mengatakan bahwa ketimpangan yang terjadi dalam suatu wilayah dikarenakan besarnya dampak balik (*backwash effect*) yang di timbulkan berbanding dengan dampak sebar (*spread effect*). Dampak balik berupa perpindahan modal atau investasi menyebabkan ketimpangan semakin besar antara wilayah satu dengan lainnya. Di samping itu, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di antaranya angatan tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia. (Islami, 2018)

Adelman, *et al* (1973) dalam Arsyad (2010), menjelaskan delapan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara yang sedang berkembang, yaitu: (a) penambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, (b) inflasi di mana pendapatan atas uang bertambah namun tidak di ikuti secara proporsional oleh pertumbuhan produksi barang-barang, (c) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, (d) investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, (e) rendahnya mobilitas sosial, (f) pelaksanaan kebijakan industri subsidi guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, (g) memburuknya nilai-nilai tukar, dan (h) hancurnya industri-industri rajinan rakyat

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu: a) Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan; b) Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang di miliki masyarakat daerah bersangkutan; c) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disosorasi pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan; d) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah di mana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar; dan e) Alokasi dana pembangunan antar wilayahnya

**Tabel 2: Jumlah Penduduk, Laju Inflasi, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Regional (UMR), dan Nilai Ekspor dan Impor Di Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Inflasi (Persen)	Persentase Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Upah Minimum Regional/ Bulan (Rp)	Nilai (Juta US \$)	
						Ekspor	Impor
2013	8.342,047	6,24	10,32	5,10	1.440.000	299,56	1.361,45
2014	8.432,163	2,75	9,54	5,08	1.800.000	1.747,91	836,21
2015	8.520,304	0,70	10,12	5,95	2.000.000	1.409,09	943,67
2016	8.606,375	0,30	9,24	4,80	2.250.000	1.154,63	843,74
2017	8.690,294	1,04	9,48	5,61	2.500.000	1.020,80	1.043,22

Sumber: BPS (2017)

Beberapa penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Adrian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan, sedangkan persentase output sektor industri, upah minimum regional dan tingkat pendidikan pekerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Sedangkan Vredrich Bantika penelitian ini ternyata hanya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks gini. Dilihat dari arah pengaruhnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi menurunkan indeks gini sedangkan penambahan jumlah penduduk meningkatkan indeks gini di Sulawesi utara

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu di bandingkan waktu sebelumnya. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah maka akan semakin tinggi pula masyarakat yang menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan karena lapangan kerja yang tercipta tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. (Sukirno, 2005). Conway (2015) mengungkapkan bahwa Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam "*Essay on Population*", Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup manusia, sedangkan nafsu manusia tak dapat di tahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari peningkatan bahan makan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Pada kasus di mana jumlah penduduk mengalami peningkatan drastis di kota dan tidak di imbangi dengan jumlah ketersediaan pangan, mengakibatkan perimbangan yang kurang menguntungkan. Untuk dapat keluar dari permasalahan kekurangan pangan, pertumbuhan penduduk harus di batasi dengan dua cara, yaitu : *Preventive checks* (pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran) dan *Positive checks* (pengurangan penduduk melalui proses kematian).

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau

kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Penetapan Upah di laksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang (Zaki, 2016).

Upah Minimum Regional atau yang sering di singkat dengan UMR, tentunya merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Untuk saat ini upah minimum regional (UMR) di kenal juga dengan istilah UMP (Upah Minimum Propinsi), karena ruang lingkup hanya sebatas satu propinsi. Setelah otonomi daerah di berlakukan penuh, di kenal juga istilah Upah Minimum Kota, Kabupaten (UMK).

Di Indonesia, hingga saat ini kebijakan upah minimum masih menjadi acuan pengupahan bagi buruh. Kebijakan upah minimum yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada akhir 80-an menandai dimulainya campur tangan Pemerintah dalam menentukan tingkat upah pemikiran dasar penetapan upah minimum adalah bahwa upah minimum merupakan langkah untuk menuju di- capainya penghasilan yang layak untuk mencapai kesejahteraan pekerja untuk memperhatikan aspek produktivitas dan kemajuan perusahaan.

Individu yang tidak memperoleh penghasilan yang cukup tidak akan dapat menciptakan permintaan akan barang dan jasa. Fenomena tersebut semakin sering kita lihat sekarang ini, khususnya di daerah perkotaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Permintaan akan barang dan jasa yang di- nyatakan dalam istilah moneter tidak menunjukkan dalam istilah nyata dari mayoritas penduduk, maka perekonomian secara otomatis telah berada pada jalan yang salah. Karena itu, kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi cenderung untuk mengabaikan permintaan golongan miskin baik di kota maupun di pedesaan. Kecenderungan inilah yang menimbulkan ketimpangan yang semakin meningkat dalam hal pendapatan.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Atau bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. (Boediono, 1992) mengartikan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi secara nasional dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan untuk tingkat provinsi atau daerah maka indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif (Todaro, 2000). Ketimpangan distribusi pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro, 2003).

Faktor produksi dan sumber daya yang dimiliki yang akan menentukan tinggi rendahnya

pendapatan. Ketika seseorang memiliki faktor produksi yang tinggi maka pendapatan yang didapatkan juga akan tinggi, sedangkan pemilik pendapatan yang rendah adalah pemilik dari faktor produksi yang sedikit. Maka hal inilah yang membuat terjadinya ketimpangan pendapatan. Alat yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan adalah koefisien Gini dan cara perhitungan yang di gunakan oleh Bank Dunia atau menggunakan kurva Lorenz.

### Data dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kuantitatif yaitu, penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi atau isi yang tertulis sebagai simbol-simbol materil. Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa majalah, Koran, iklan, televisi atau media lain. dan juga memanfaatkan data yang sudah tersedia di lembaga pemerintah atau yang lain.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Metode Deskriptif. Metode deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah- masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi di mana bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya bersumber melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian maupun publikasi terbatas dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2013-2016, serta lembaga atau instansi-instansi lain yang terkait dan mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* periode tahun 2013-2017. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dan subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder yang digunakan meliputi: Rasio Gini, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional, dan Pertumbuhan Ekonomi. Data- data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Selatan.

Model yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi linear berganda OLS (*Ordinary Least Method*) atau metode satu tahap dengan bantuan software SPSS, yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Pengujian dilakukan menggunakan program SPSS 24, di mana variabel independen adalah Jumlah Penduduk ( $X^1$ ), UMR ( $X^2$ ), dan Pertumbuhan Ekonomi ( $X^3$ ) sedangkan variabel dependen adalah Ratio Gini (Y). Adapun persamaan penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \quad (1)$$

Perbedaan satuan ukur dalam variabel penelitian menyebabkan persamaan regresi awal kemudian ditransformasikan menjadi logaritma berganda (Ln) dengan tujuan menyeragamkan ukuran data menjadi terstandar secara statistik. Dengan demikian pendekatan analisa regresi dalam bentuk logaritma natural menjadi:

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \quad (2)$$

Di sini  $Y$  adalah Rasio Gini Provinsi Sulawesi Selatan,  $X_1$  adalah variabel Jumlah Penduduk,  $X_2$  adalah variabel Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sulawesi Selatan,  $X_3$  adalah variabel Pertumbuhan Ekonomi,  $\beta_0$  adalah Koefisien Konstanta,  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  adalah Koefisien Regresi, dan  $\mu$  adalah *Error Term*.

### Hasil dan Pembahasan

Arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian dengan menggunakan persamaan regresi diperlihatkan dalam Tabel 3. Tabel ini menunjukkan hasil *output* SPSS 24 terhadap tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu: Jumlah Penduduk ( $X_1$ ), Upah Minimum Regional (UMR) ( $X_2$ ), dan Pertumbuhan Ekonomi ( $X_3$ ) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan ( $Y$ ) di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 3: Rekapitulasi Hasil Analisis Model Regresi**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.168	.042		3.976	.001
	Jumlah Penduduk ( $X_1$ )	.002	.004	.077	.635	.535
	UMR ( $X_2$ )	-.006	.002	-.342	-2.822	.013
	Pertumbuhan Ekonomi ( $X_3$ )	.040	.006	.855	7.074	.000
R	= 0.889					
R square	= 0.790					
Adjusted R Squar	= 0.748					
F hitung	= 18.788					

Sumber: BPS (2017)

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi ( $\beta_0$ ) pada Tabel 3, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln Y &= \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \\ Y &= 0,168 + 0,002 X_1 - 0,006 X_2 + 0,040 X_3 + \mu \end{aligned}$$

Koefisien-koefisien pada persamaan regresi lienear berganda pada Tabel 3 menunjukkan hasil regresi penelitian. Nilai koefisien  $\beta_0$  diperoleh sebesar 0,168, yang berarti bahwa variabel jumlah penduduk ( $X_1$ ), UMR ( $X_2$ ), dan pertumbuhan ekonomi ( $X_3$ ) tidak mengalami konstan, maka memungkinkan terjadinya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,168. Apabila Jumlah Penduduk meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,002. Selanjutnya apabila UMR meningkat 1%, maka akan menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar -0,006. Kemudian jika terjadi Pertumbuhan Ekonomi meningkat 1%, maka akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,040. Nilai *Standar Error* dalam penelitian adalah sebesar 0,042 hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai standar error maka persamaan tersebut akan semakin baik untuk dijadikan sebagai alat untuk prediksi.

**Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 4.9 diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,002 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% jumlah penduduk maka ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat sebesar 0,002% dan juga sebaliknya. Arah hubungan antara jumlah penduduk dan ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan adalah searah (+), dimana kenaikan atau penurunan jumlah penduduk akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah penduduk merupakan keseluruhan penduduk yang tinggal di wilayah tertentu. Penambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar daripada permintaan akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau dibayar dengan upah dibawah standar. Hal inilah yang berdampak pada semakin tingginya angka ketimpangan. Hasil penelitian yang dilakukan Fulgangs (2013) dimana peningkatan populasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fafan Tristanto, Vredrich Bantika, dan Ani Nurlaili dimana hasil yang didapatkan berpengaruh positif dan signifikan.

**Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 3 nilai koefisien regresi UMR sebesar -0,006, hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Upah Minimum Regional (UMR) maka ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0,006% dan sebaliknya. Arah hubungan antara UMR dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah searah (-), dimana kenaikan atau penurunan UMR akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Teori Karl Marx berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal pembangunan akan menyebabkan kenaikan tingkat upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenaga kerja sehingga permintaan tenaga kerja mengalami penurunan, hal ini berakibat terjadinya pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan hanya tahap awal pembangunan, kemudian sebaliknya. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Jonna P. Estudillo, Adrian Coto dimana Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 3 dengan nilai koefisien pertumbuhan penduduk sebesar 0,040 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,040% dan sebaliknya. Arah hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan adalah searah (+), dimana kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan

distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil uji t, dengan melihat nilai koefisien sebesar 0,040, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pertumbuhan Ekonomi akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,040%. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian empiris yang dilakukan Fafan Triastanto (2015), Adrian (2006), Vredrich Bantika, dan Ani Nurlaili (2016) dimana Variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditemukan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa jumlah penduduk di Sulawesi Selatan pada penelitian ini menunjukkan pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan, sementara upah Minimum Regional (UMR) di Sulawesi Selatan menunjukkan pengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

### **Referensi**

- Adisasmita R. 2005. Pembangunan Ekonomi Perkotaan. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Akai, Nobuo dan Masayo sakata. 2005. Fiscal Decentralization, Commitment, and Regional Inequality: Evidence fram Statel-level Cross-sectional Data for the United States. CIRJE-F-315. Diakses dari <http://www.e.u-tokyo.ac.jp/cirje/research/03research02dp.html> pada 23 Mei 2017.
- Arsyad L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Arsyad L 2010. Pengantar dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE
- As-Shiddieqy, T.M Hasbie. 2000. Tafsir Al-Quran Masjid An-Nuur. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bantika, Vredrich. 2015. Jurnal: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara.
- BPS. 2016. Gini Rasio Sulawesi Selatan. Makassar BPS. 2016. PDRB Sulawesi Selatan. Makassar.
- BPS. 2017. Sulawesi Selatan Dalam Angka 2017. Makassar. Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE
- Chenery, Hollis, et.al. 1978. Redistribution with Growth Ocford University Press. London.
- Conway Edmund. 2015. 50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Elisa. 2016. Jurnal Kependudukan. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada (UGM). Diakses Dari [http://www.google.ur/jurnal/kependudukan/fe\\_lisa.ugm.ac.id](http://www.google.ur/jurnal/kependudukan/fe_lisa.ugm.ac.id). pada 23 Mei 2017.
- Fitrah Islami Sari, SBM Nugroho. 2018. Jurnal : Faktor-faktor Mempengaruhi Ketimpagan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Jawa Tengah: Universiatas Tidar.
- Fulsangsang S. 2013. Determinants of Income Inequality. Sub-Saharan Perspective. Aarhus.

- Gujarati, D.N. and D.C. Porter. 2004. Basic Ekonometrics, Fourth Edition. New York: McGraw-Hill.
- H.Syamsuddin. HM. 2011. Perhitungan Indeks Gini Ratio dan Analisis Ke- senjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2010. Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangun- an, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
- Hariadi Pramono,dkk. JurnalEkonomi Pem-bangunan: Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Bayumas Jawa Tengah. Purwokerto: Universitras Jendral Soedirman.
- Jhingan. 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali. Press Kasirijm M. 2006. Metode Penelitian Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMD YKPN. Yogyakarta.
- Kutner, M.H, C.J, Nachtsheim, dan J. Neter. 2004. Applie Linear Regression Models.ed. New York: McGraw-Hill Companies,inc.
- Lukman, S.,2011. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Ekonisia Lumbantoruan, Magdalena. 1992.Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen.
- Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka. Diakses dari: [http://id.m.wikipedia.org/wiki/kurva\\_Lorenz](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kurva_Lorenz). Pada 28 September 2019
- Murty. 2000. Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Berkelanjutan., Bogor: P4W Press.
- Nurlaili, Ani. 2016. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimangaan Distribusi Pendapatan. Yogyakarta
- Rakyatku.com. 2016 . Pertumbuhan Ekonomi SulSel Tertinggi Ketiga Nasional. Diakses dari: <http://news.rakyatku.com/read/44548/2017/04/06/pertumbuhan-ekonomi-sulsel-tertinggi-ketiga-nasional>. Pada 5 Mei 2017
- RI, K.A. 1995. AL Quran dan Terjemahannya. Semarang: PT. Karya Toha Putra. Siradjuddin. 2012. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Skousen Mark. 2005. Sang Mestro Teori-teori Ekonomi Moderen, Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alvabeta.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alvabeta.
- Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan:Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan. Jakarta: LPEF-UI Bima Grafika.
- Sukirno, Sadono. 2005. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-2. Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ke-3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2013. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT.Raja Erlangga Group.
- Sumitro Djojohadikusumo. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Gramedia
- Suryono. 2000. Ekonomika Pembangunan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Tambunan. 2001.

Perekonomian Indonesia.. Jakarta : Gahlia Indonesia

Taufiq, Z.N. 2016. Makalah Ekonomi Ketentuan Upah Minimum Regional. Diakses dari: <http://akuntansipublikums.blogspot.com/2016/01/makalah-ekonomi-ketentuan-upah-minimum.html>. Pada 5 Mei 2017

Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. Todaro, M.P. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga. Jakarta: Erlangga. Todaro, M.P. 2006. Pembangunan Ekonomi Edisi ke 9. Jakarta : Erlangga.

Todaro, M.P. 2011. Pembangunan Ekonomi Edisi ke 11. Jakarta: Erlangga

Wahab Abdullah. 2014. Modul Pratikum Statistik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makass